**WALIKOTA SOLOK**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK**

**NOMOR 40 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**WALIKOTA SOLOK,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | **:** | 1. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 |
| **Mengingat** | **:** | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kota Madya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 36);
14. Peraturan Walikota Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 53).
 |
| **M E M U T U S K A N :** |
| **Menetapkan** | **:** | **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Penyelenggaraan Pemerintah adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada seluruh unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Pelayanan Ekternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. SOP DPPPA dimaksudkan sebagai panduan dan pedoman dalam mengidentifikasikan, merumuskan, menyusun dan mengembangkan SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah :
3. meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan; dan
5. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP SOP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup SOP DPPPA meliputi seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan internal maupun ekternal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

**BAB IV**

**PENYUSUNAN, SYARAT DAN TAHAPAN PENYUSUNAN SOP**

**Bagian Kesatu**

**Penyusunan SOP**

**Pasal 4**

1. Proses penyusunan SOP pada DPPPA dikoordinasikan oleh Sekretaris.
2. Nama-nama SOP DPPPA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**

**Syarat Penyusunan SOP**

**Pasal 5**

Syarat SOP meliputi :

1. mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
2. mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi;
3. memperhatikan identifikasi kebutuhan SOP;
4. memperhatikan SOP yang telah dilakukan;
5. melibatkan minimal 2 (dua) orang atau pihak; dan
6. menghasilkan paling sedikit 1 (satu) output tertentu.

**Bagian Ketiga**

**Tahapan Penyusunan SOP**

**Pasal 6**

Tahapan Penyusunan SOP meliputi :

1. persiapan;
2. penilaian kebutuhan;
3. pengembangan;
4. penerapan; dan
5. pemantauan dan evaluasi.

**BAB V**

**PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

1. Kepala Dinas wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan SOP.
2. Kepala Dinas dapat melakukan pengembangan SOP sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

1. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan SOP, dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh unit organisasi penyelenggara kegiatan.
2. Evaluasi SOP dapat dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok atau lembaga independen yang diminta bantuannya oleh pemerintah daerah.

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 67 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

|  |  |
| --- | --- |
| Ditetapkan di | SOLOK |
| Pada Tanggal | 2 Oktober 2017 |
| **WALIKOTA SOLOK,**DTO |
| **ZUL ELFIAN** |

|  |  |
| --- | --- |
| Diundangkan di | SOLOK |
| Pada Tanggal |  2 Oktober 2017 |
| **SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,** **DTO****RUSDIANTO** |

**BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 40**

**LAMPIRAN :**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMOR** | **:** | **40 TAHUN 2017** |
| **TANGGAL** | **:** |  **2 OKTOBER 2017** |
| **TENTANG** | **:** | **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  |

| **No.** | **NAMA SOP** | **NOMOR**  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN** |
| 1 | Pengelolaan Surat Masuk | 061/01/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 2 | Pengelolaan Surat Keluar | 061/02/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 3 | Peminjaman Kendaraan Dinas | 061/03/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 4 | Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai | 061/04/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 5 | Proses Cuti | 061/05/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 6 | Permintaan Barang ATK | 061/06/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 7 | Penyampaian Usulan Kenaikan Pangkat | 061/07/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 8 | Penilaian SKP | 061/08/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 9 | Pengurusan Kartu Istri atau suami | 061/09/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 10 | Pengajuan Pensiun | 061/10/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 11 | Pemeriksaan Barang | 061/11/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 12 | Pengadaan Barang dan Jasa(Penunjukan Langsung) | 061/12/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 13 | Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala  | 061/13/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 14 | Pengurusan Kartu Pegawai | 061/14/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 15 | Pembuatan Surat Undangan | 061/15/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| **SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN** |
| 16 | Pengajuan Perawatan Barang | 061/16/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 17 | Penghapusan Aset | 061/17/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 18 | Pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS | 061/18/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 19 | Pencairan dana Kegiatan pada Bendahara | 061/19/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 20 | Pembuatan RKA dan DPA | 061/20/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 21 | Pembuatan Laporan Semesteran dan Prognosis | 061/21/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 22 | Pembuatan Penetapan Kinerja | 061/22/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 23 | Pembuatan Rencana Kerja OPD | 061/23/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 24 | Pembuatan LKPJ dan LPPD | 061/24/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 25 | Pembuatan Laporan Bulanan Monev Kegiatan | 061/25/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 26 | Penyusunan Laporan Akhir Tahun | 061/26/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 27 | Pembuatan Rencana Strategis | 061/27/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 28 | Pembuatan Lakip | 061/28/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| **BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK** |
| 29 | Pembentukan Pengurus Gugus Tugas Kota Layak Anak  | 061/29/SOP/PHA/DPPPA-2017 |
| 30 | Sosialisasi Kota Layak Anak/ Rapat Koordinasi SKPD dan Kelembagaan KLA Launching Puskesmas Ramah anak (PRA)  | 061/30/SOP/PHA/DPPPA-2017 |
| 31 | SOP Penyebarluasan Informasi | 061/31/SOP/PHA/DPPPA-2017 |
| 32 | SOP Penyebarluasan Data | 061/32/SOP/PHA/DPPPA-2017 |
| 33 | Prosedur Forum Anak Daerah Kota Solok Permintaan Nama | 061/33/SOP/PHA/DPPPA-2017 |
| 34 | Prosedur Rekapitulasi Nama Peserta Forda | 061/34/SOP/PHA/DPPPA-2017 |
| 35 | Prosedur Permintaan Nama Forum Anak Daerah Kecamatan | 061/35/SOP/PHA/DPPPA-2017 |
| 36 | Pembentukan Pengurus Forda dan FKPAS | 061/36/SOP/PHA/DPPPA-2017 |
| 37 | Prosedur Permintaan Nama Forum Anak Daerah Kelurahan | 061/37/SOP/PHA/DPPPA-2017 |
| 38 | Bantuan Hibah Barang | 061/38/SOP/PHA/DPPPA-2017 |
| 39 | Prosedur Permintaan Narasumber | 061/39/SOP/PHA/DPPPA-2017 |
| 40 | Pembuatan Sambutan Kepala Dinas pada Seksi Pemberdayaan Perempuan | 061/40/SOP/PHA/DPPPA-2017 |
| 41 | Pelatihan/Sosialisasi/Workshop/Seminar/Advokasi pada Seksi Kelembagaan PUG dan Organisasi Perempuan | 061/41/SOP/PHA/DPPPA-2017 |
| **BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK** |
| 42 | Penanganan Korban Kekerasan | 061/42/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 43 | Pelatihan Penanganan Kasus KDRT dan KTA bagi Pengurus P2TP2A | 061/43/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 44 | Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus KDRT dan KTA bagi Pengurus P2TP2A | 061/44/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |
| 45 | Sosialisasi P2TP2A ke masyarakat | 061/45/SOP/Sekre/DPPPA-2017 |

**WALIKOTA SOLOK,**

 DTO

 **ZUL ELFIAN**